



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN
DESA TLOGOPAYUNG**

Alamat : Jl. Curug Semawur Pikatan RT 001 RW 004 Tlogopayung

KEPUTUSAN

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN TLOGOPAYUNG PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

NOMOR : 500.12.11/17/ 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN PLANTUNGAN
DESA TLOGOPAYUNG**

Alamat : Jl. Curug Semawur Pikatan RT 001 RW 004 Tlogopayung

KEPUTUSAN

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN TLOGOPAYUNG PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

NOMOR : 500.12.11/17/ 2026

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat
dan terbatas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

- daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 96)
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No. 40)
19. Keputusan Bupati Kendal Nomor 022/144/2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Kendal.
20. Keputusan Kepala Desa Tlogopayung Nomor 141/11/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana diktum KESATU terdiri dari :

- a. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- b. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta; dan
- c. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

KETIGA : Lembar Daftar Informasi Publik yang tercantum dalam lampiran 1, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal
pada tanggal : 2 Juli 2026

KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI,



ANDY HERMANTO

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Tlogopayung

Nomor : 500.12.11/14/ 2026

Tanggal : 2 Juli 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DESA TLOGOPAYUNG KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

No	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/ Unit/ Satker yang menguasai informasi	Waktu dan Tempat pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia	Wajib diumumkan secara berkala	Informasi wajib diumumkan Serta merta	Wajib disediakan Setiap saat	Jangka penyimpanan atau Retensi arsip
Informasi Berkala									
A.	Profil Kedudukan	Jl Curug Semawur Pikatan RT 001 RW 004 Tlogopayung	Kasi Pemerintahan	2026	Soft Copy			tlogopayung.kendalkab.go.id	
	1. Kedudukan dan struktur SKPD	Berisi tentang kedudukan dan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku	Kasi Pemerintahan	2026	Soft Copy	✓		tlogopayung.kendalkab.go.id	
	2. Alamat lengkap, telepon, fax.	Berisi tentang alamat lengkap SKPD Telf dan Fax yang bisa dihubungi	Kasi Pemerintahan	2026	Soft Copy	✓		tlogopayung.kendalkab.go.id	
	3. Visi, misi	Berisi tentang Visi dan Misi SKPD sesuai Renstra SKPD	Kasi Pemerintahan	2026	Soft Copy	✓		tlogopayung.kendalkab.go.id	
	4. Tugas dan fungsi	Berisi tentang tugas dan Fungsi SKPD sesuai peraturan Perundang Undangan yang berlaku	Kasi Pemerintahan	2026	Soft Copy	✓		tlogopayung.kendalkab.go.id	

	5. Profil singkat dan Sejarah SKPD	Berisi tentang Profil dan Sejarah SKPD	Kasi Pemerintahan	2026	Soft Copy	✓		tlogopayung.kendalkab.go.id	
								tlogopayung.kendalkab.go.id	
B.	Profil Pejabat							tlogopayung.kendalkab.go.id	
	1. Riwayat Pendidikan	Berisi tentang Riwayat Pendidikan Pimpinan dan Pejabat Struktural pada SKPD	Kasi Pelayanan	2026	Hard Copy	-			
	2. Riwayat Jabatan	Berisi tentang Riwayat Jabatan Pimpinan dan Pejabat Struktural pada SKPD	Kasi Pelayanan	2026	-	-		tlogopayung.kendalkab.go.id	
C.	Program dan Kegiatan SKPD								
	1. Nama program dan kegiatan	Berisi tentang program dan kegiatan SKPD pada tahun anggaran berjalan	Kaur Perencanaan dan Tata Usaha	2026	Hard Copy & Soft Copy	✓			
	2. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta 2. Penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan	Berisi tentang Penanggung Jawab, Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD serta No Telepon dan atau alamat yang bisa di hubungi	Kaur Perencanaan dan Tata Usaha	2026	Hard Copy & Soft Copy	✓			

		lahu, tujuan sasaran program dan Kegiatan		anggaran di SKPD					
E.	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik								
	1. Jumlah permintaan informasi yang diterima	Berisi Tentang Permohonan Informasi Publik	Pengelola Sistem Informasi						
	2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi	Berisi tentang Jawaban Permintaan Informasi Publik	Pengelola Sistem Informasi						
	3. Jumlah permintaan informasi yang dilakukan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak	Berisi jawaban yang disampaikan kepada pemohon sejumlah 15 jawaban Permintaan Informasi Publik	Pengelola Sistem Informasi						
	4. Alasan Penolakan informasi	Berisi Informasi publik ketentuan Informasi yang berlaku	Pengelola Sistem Informasi						
F.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan								
	1. Peraturan Desa				Hard Copy &	✓			
	2. Peraturan Kepala				Hard Copy	✓			

	Desa								
	3. Keputusan Kepala Desa				Hard Copy	✓			
G.	Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang								
	1. Jumlah permintaan informasi diterima								
	2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi								
	3. Jumlah permintaan\ informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak								
	4. Alasan penolakan informasi								
	Informasi yang serta merta								
	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat								
	Aptel								

A.	Informasi tentang Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan								
B.	1. Naskah Akademis, kajian atau pertimbangan terkait perencanaan pembangunan								
	2. Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang diambil								
	3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan								
	- Berita Acara Musrenbang Kecamatan								
	4. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan								
	- Hasil Musrenbang Kecamatan								
	5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan								

	Tahapan Musrenbang								
6.	Peraturan, Keputusan dan atau Kebijakan yang telah diterbitkan								
7.	Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik								
C. Informasi tentang Organisasi, Administrasi									
1.	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan	Berisi tentang SOP dan SP yang ditetapkan SKPD.	Kasubag Perencanaan pada Sekretariat	Setiap Penyusunan SOP dan SP di SKPD	Hard Copy	✓			
2.	Profil lengkap pimpinan dan pegawai	Berisi tentang Profil lengkap Pegawai	Kasi Pemerintahan		Hard Copy Soft Copy	✓		Papan informasi Pegawai tlogopayung.kendakab.go.id	
3.	Anggaran badan publik secara umum		Sekretariat						
4.	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukungnya		Sekretariat						
5.	Surat menyurat pimpinan atau								

	pejabat								
6.	Syarat-syarat perijinan, izin yang diterbitkan dan atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan								
7.	Data perbendaharaan atau inventaris	Berisi tentang data Perbendaharaan dan Inventaris	Kaur Perencanaan dan kaur Keuangan	Semesteran di SKPD					
8.	Agenda kerja pimpinan satuan kerja	Berisi tentang Agenda Kerja Pimpinan SKPD	Kaur Umum	Setiap Hari / Bulan di SKPD					
9.	Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya								
10.	Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan								

penindakannya								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Kendal
Pada Tanggal : 2 Juli 2026
KEPALA DESA TLOGOPAYUNG
SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI,



ANDY HERMANTO